



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN  
KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Seluma adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 37.772''$  LS dan  $103^{\circ} 00' 09.747''$  BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 05.694''$  LS dan  $102^{\circ} 59' 14.313''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 53.129''$  LS dan  $102^{\circ} 57' 43.296''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 54.176''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 40.541''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 56.403''$  LS dan  $102^{\circ} 55' 18.462''$  BT,

selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 32.072''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 48.927''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

- d. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 42.716''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 01.595''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 43.701''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 05.320''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- e. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 12' 04.575''$  LS dan  $102^{\circ} 53' 40.628''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 13.570''$  LS dan  $102^{\circ} 52' 50.656''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- f. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10A dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 29.382''$  LS dan  $102^{\circ} 52' 51.898''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 29.586''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 28.632''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 23.360''$  LS dan  $102^{\circ} 55' 04.904''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 24.861''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 00.329''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 44.591''$  LS dan  $102^{\circ} 54' 03.917''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 47.562''$  LS dan  $102^{\circ} 53' 07.150''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat  $4^{\circ} 16' 59.399''$  LS dan  $102^{\circ} 51' 42.438''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17

- dengan koordinat 4° 18' 56.725" LS dan 102° 51' 23.858" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 4° 20' 40.586" LS dan 102° 50' 34.733" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat 4° 19' 11.241" LS dan 102° 49' 35.742" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- k. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat 4° 19' 36.129" LS dan 102° 48' 44.229" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat 4° 20' 13.671" LS dan 102° 48' 26.240" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan
- l. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1 dengan koordinat 4° 20' 44.800" LS dan 102° 48' 11.400" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat 4° 21' 15.206" LS dan 102° 47' 45.887" BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2020.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 75.

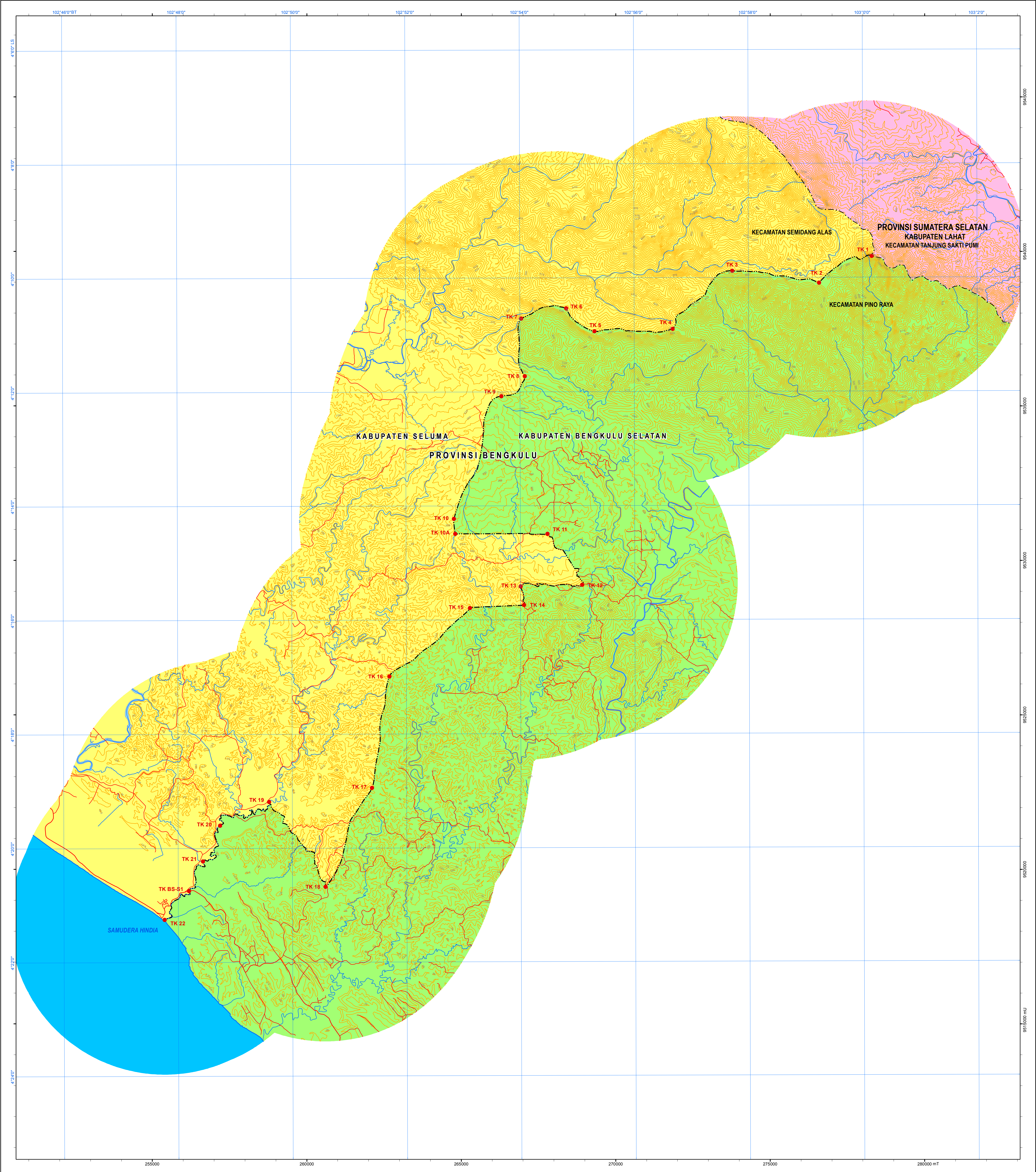
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Gani Muhammad, SH, MAP  
Revisi Jilid Muda (IV/c)  
NIP. 19690815 199603 1001

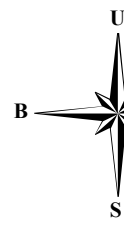




LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 9 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU



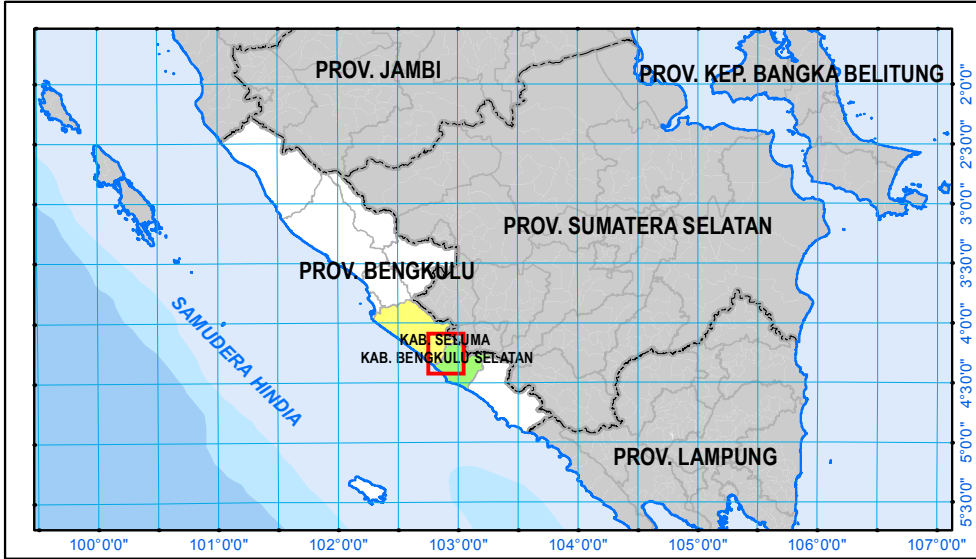
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH ANTARA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA  
PROVINSI BENGKULU**



SKALA 1 : 50.000



DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84  
Zona : 48 M  
Satuan Tinggi : meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

**LEGENDA**

	: Tiik Kartometrik		: Jalan		: Garis Kontur
	: Batas Provinsi		: Sungai		: Tubuh Air
	: Batas Kabupaten				

**DAFTAR KOORDINAT BATAS ANTARA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA  
PROVINSI BENGKULU**

NO.	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	TK 1	4° 09' 37.772" LS	103° 00' 09.747" BT	278288	9539852
2	TK 2	4° 10' 05.694" LS	102° 59' 14.313" BT	276581	9538990
3	TK 3	4° 09' 53.129" LS	102° 57' 43.296" BT	273772	9539369
4	TK 4	4° 10' 54.176" LS	102° 56' 40.541" BT	271841	9537488
5	TK 5	4° 10' 56.403" LS	102° 55' 18.462" BT	269309	9537413
6	TK 6	4° 10' 32.072" LS	102° 54' 48.927" BT	268396	9538158
7	TK 7	4° 10' 42.716" LS	102° 54' 01.595" BT	266937	9537827
8	TK 8	4° 11' 43.701" LS	102° 54' 05.320" BT	267057	9535954
9	TK 9	4° 12' 04.575" LS	102° 53' 40.628" BT	266297	9535310
10	TK 10	4° 14' 13.570" LS	102° 52' 50.656" BT	264766	9531343
11	TK 10A	4° 14' 29.382" LS	102° 52' 51.898" BT	264806	9530857
12	TK 11	4° 14' 29.586" LS	102° 54' 28.632" BT	267790	9530859
13	TK 12	4° 15' 23.360" LS	102° 55' 04.904" BT	268913	9529210
14	TK 13	4° 15' 24.861" LS	102° 54' 00.329" BT	266921	9529158
15	TK 14	4° 15' 44.591" LS	102° 54' 03.917" BT	267033	9528552
16	TK 15	4° 15' 47.562" LS	102° 53' 07.150" BT	265283	9528456
17	TK 16	4° 16' 59.399" LS	102° 51' 42.438" BT	262676	9526242
18	TK 17	4° 18' 56.725" LS	102° 51' 23.858" BT	262113	9522635
19	TK 18	4° 20' 40.586" LS	102° 50' 34.733" BT	260607	9519440
20	TK 19	4° 19' 11.241" LS	102° 49' 35.742" BT	258779	9522180
21	TK 20	4° 19' 36.129" LS	102° 48' 44.229" BT	257193	9521410
22	TK 21	4° 20' 13.671" LS	102° 48' 26.240" BT	256641	9520255
23	TK BS-S1	4° 20' 44.800" LS	102° 48' 11.400" BT	256186	9519297
24	TK 22	4° 21' 15.206" LS	102° 47' 45.887" BT	255402	9518361

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
**R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001